PERJUANGAN PETANI DALAM MENEGAKKAN KEDAULATAN PANGAN

Oleh: Drs H. Henry Saragih
(Ketua Umum Serikat Petani Indonesia)

Untuk dipresentasikan di Seminar Nasional
"Tinjauan Akademis, Konsepsi, dan Strategi Kedaulatan Pangan"
yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah,
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Bogor, 10 Oktober 2015

A. KEADAAN UMUM PANGAN DAN PERTANIAN DI INDONESIA DAN DUNIA

Kondisi petani Indonesia pada abad ke XXI ini harus bertahan dari hantaman kebijakan globalisasi neoliberalisme, petani Indonesia bagaikan orang yang sudah jatuh dari tangga, kemudian tangga tersebut menimpa dirinya. Di tengah petani Indonesia yang tak menguasai dan memiliki tanah, petani Indonesia diserbu oleh pasar Internasional. Akibatnya petani Indonesia yang sudah *gurem* tersebut semakin termarginalkan. Hal itu bisa dilihat dari petani kedelai yang tak sanggup bersaing dengan derasnya impor kedelai dari USA dan Brasil. Demikian juga petani bawang putih, jagung, peternak unggas, sapi, susu, dsb. Produk-produk pertanian singkong, talas, pisang dan tanaman lainnya penghasil karbohidrat tak bisa berkembang karena harus bersaing dengan impor gandum yang besar yang diimpor dari Australia, USA dan sebagainya.

Sepanjang tahun 2014, Indonesia telah mengimpor gandum sebesar 7,5 juta ton. Gandum impor terbesar berasal dari Australia dan Amerika Serikat. Sedangkan sampai pada pertengahan 2015, impor gandum sudah mencapai 4,2 jura ton. Sampai pada akhir tahun ini patut diduga jika tak ada perubahan pola konsumsi karbohidrat yang radikal maka impor gandum pada tahun 2015 akan lebih tinggi dibanding tahun 2014. Berdasarkan grafik. 1 tampak bahwa kecenderungan meningkatnya konsumsi gandum sepanjang tahun 2015 kemungkinannya sangat tinggi.

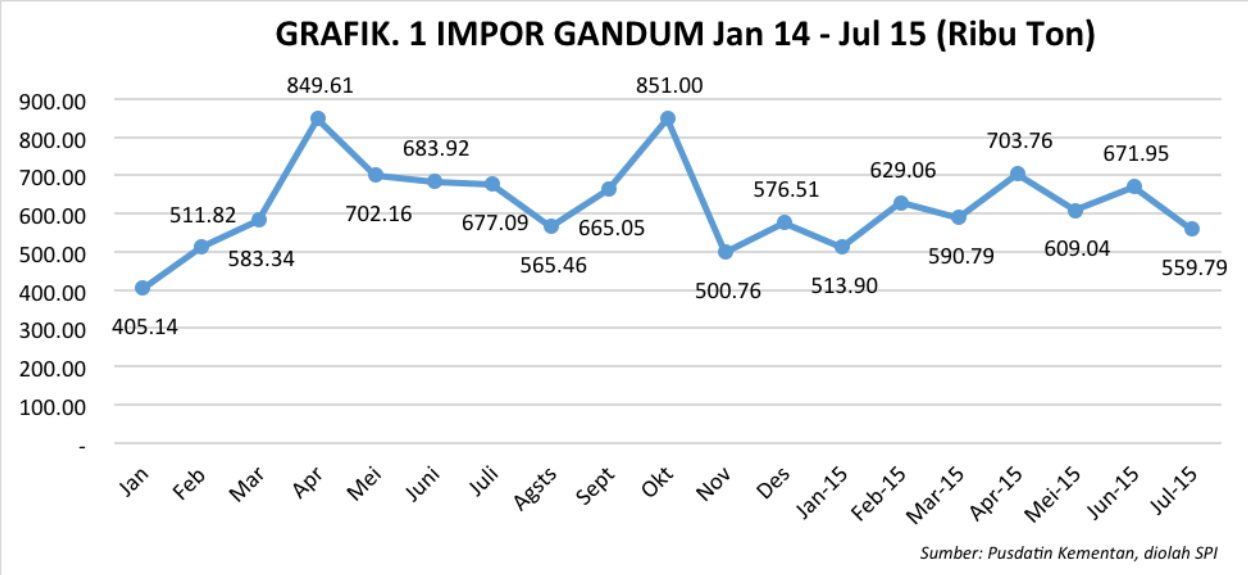

Selanjutnya yaitu impor kacang kedelai segar dan olahan. Kuota impor terbesar kacang kedelai berasal dari Amerika Serikat dan Argentina. Sejak awal tahun 2014 hingga akhir tahun 2015, impor kedelai tertinggi terjadi pada bulan Juni 2014. Pada kenyataannya kenaikan harga kacang kedelai dalam beberapa bulan belakangan ini tak menurunkan tren konsumsi masyarakat.

Pada kondisi demikian, ketergantungan terhadap konsumsi kedelai impor akan semakin mengkhawatirkan. Terlebih target pemerintah untuk swasembada kedelai pada tahun 2017

masih menjadi tanda tanya. Berikut Grafik. 2 perkembangan impor kedelai sejak awal 2014 sampai petengahan 2015 ini.

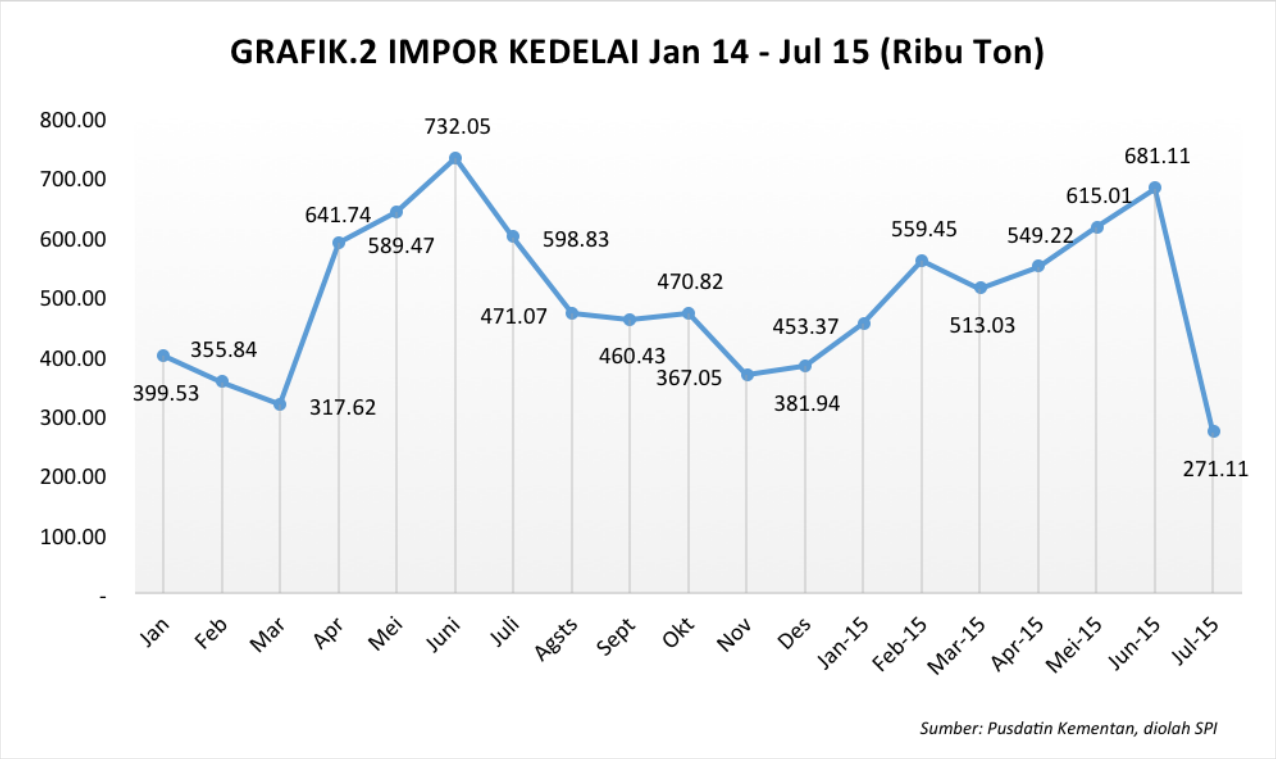

Berdasarkan Grafik. 3, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, impor jagung tertinggi terjadi pada tahun 2014yakni sebesar 3,29 juta ton. Mayoritas jagung impor yang masuk ke Indonesia berasal dari Brazil. Pada pertengahan tahun 2015, total impor jagung segar dan olahan mencapai 2,1 juta ton. Dan bukan suatu yang mustahil jika industri masih enggan menerima jagung nasional sebagai bahan bakunya.

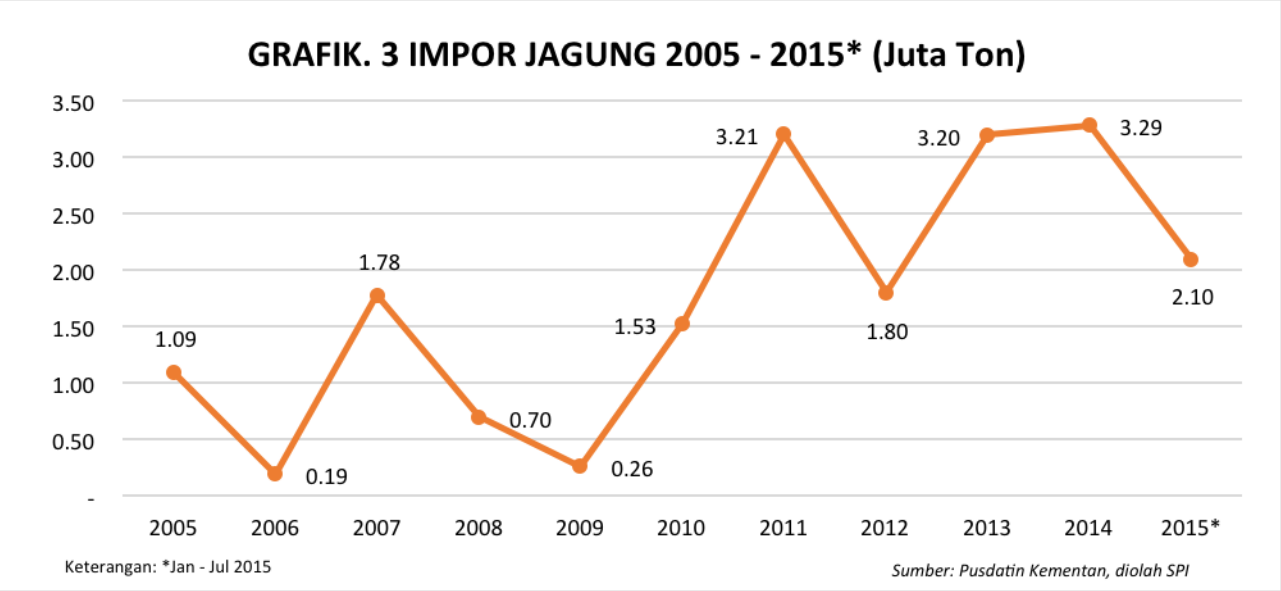

Impor gula pada semester pertama 2015 mencapai 1,8 juta ton atau sekitar 65 persen dari total impor gula pada tahun 2014 sebesar 2,9 juta ton. Pada grafik. 4 menunjukan bahwa impor gula pada setiap bulan sangat fluktuatif. Artinya keseimbangan neraca pasar gula belum terjamin sepenuhnya untuk kepentingan petani tebu nasional.

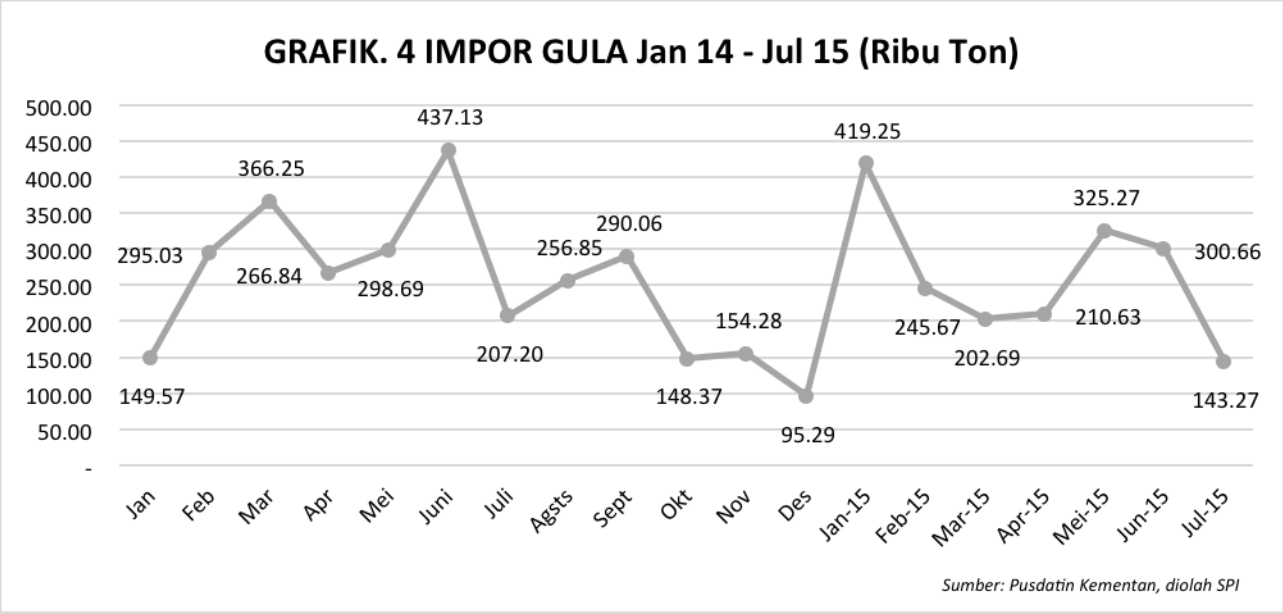

Selama sepuluh tahun terakhir, impor daging sapi selalu diatas 12 ribu ton per tahun. Impor sapi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 91 ribu ton dan tertinggi kedua terjadi pada tahun 2014 yang lalu sebesar 76,85 ribu ton. Sementara itu peternak sapi potong nasional terus mengalami rintangan dari pengaturan harga pasar dan serangan daging sapi impor dari Australia serta Selandia Baru. Adapun perkembangan impor daging sapi sejak tahun 2014 – pertengahan 2015 pada grafik. 5 berikut ini.

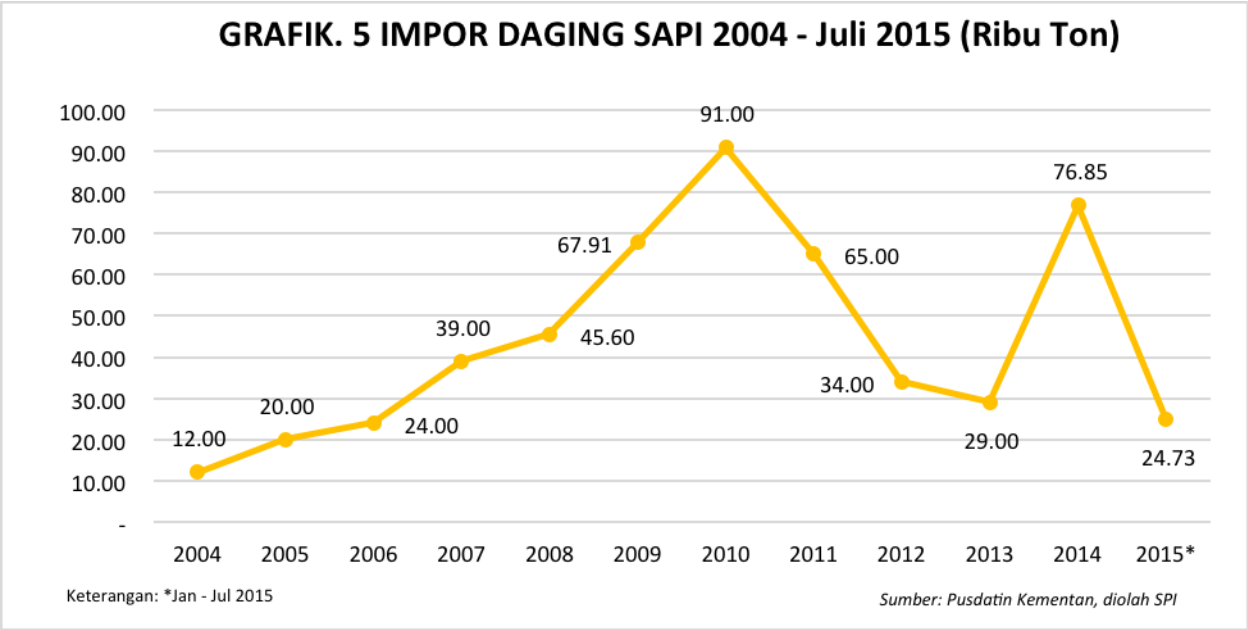

Impor susu dan kepala susu setiap bulan rutin dilakukan. Walaupun kebanyakan diperuntukan bagi industri. Ekspansi susu impor sepertinya belum bisa dihindari dalam waktu dekat ini. Sebab di Eropa tengah terjadi fenomena bahwa harga susu lebih murah dibandingkan dengan harga air mineral. Kejadian ini selain memberikan kerugian bagi peternak di Eropa, juga akan menimbulkan ancaman bagi para peternak nasional karena susu yang melimpah di Eropa, cepat atau lambat masuk ke Indonesia.

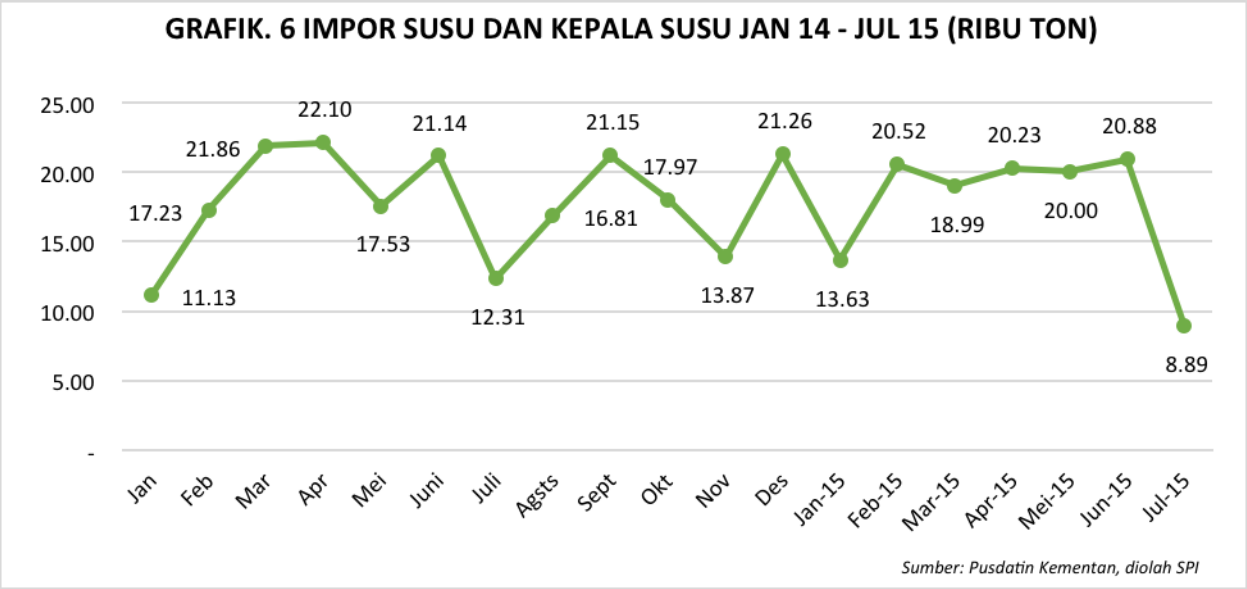

Kenyataan berbeda justru ditunjukan oleh data pada grafik. 6. Pada bulan Juli 2015 impor susu turun drastis sebesar 40 persen jika dibandingkan pada bulan juni 2015. Namun hal ini bukanlah menjadi suatu jaminan. Karena yang terpenting adalah peternak susu terjamin, konsumsi susu masyarakat meningkat dan kestabilan harga tercipta.

Sesungguhnya apa yang dialami oleh petani Indonesia itu hampir bersamaan dengan yang dialami oleh petani yang terjadi di belahan dunia lain, seperti di India, Jepang, Korea, bahkan di USA dan Eropa. Karena produk-produk pertanian yang di impor ke Indonesia itu bukanlah produk dari keluarga-keluarga petani di negara-negara importir tersebut, yang terjadi sebenarnya produsen dan pengimpor produksi pertanian tersebut adalah perusahaan-perusahaan pertanian yang menguasai dari hulu sampai dengan hilir. Perusahaan-perusahaan itu menguasai benih sampai dengan pemasarannya. Semisal Chargill, Monsanto. Perusahaan-perusahaan inilah yang mendikte para pemimpin-pemimpin dunia untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan liberalisasi dan privatisasi dibawah payung organisasi *World Trade Organization* (WTO), yang berhasil di bentuk pada tahun 1995. Dimana Indonesia adalah negara yang tergolong pertama sekali meratifikasi kesepakatan itu, artinya negara yang tergolong awal menjadi anggota WTO.

Di tengah krisis moneter, dan politik di Indonesia pada tahun 1998, pemerintahan Soeharto sebelum berakhir mengikatkan diri dengan IMF dalam bentuk *Letter of Intent* (LOI), yang isinya meliberalisasikan dan privatisasikan perekonomian Indonesia. Adapun isi LOI itu diantaranya adalah pemerintah Indonesia harus membuka pasar dalam negerinya, tak terkecuali pangan. Indonesia juga harus menghapus subsidi kepada petani.

Memprivatisasikan sumber-sumber agraria, dan lembaga-lembaga pemerintah yang mengurus urusan publik.

Akibatnya sejak tahun 1998, pasar Indonesia dibuka selebar-lebarnya, impor kedelai, jagung, gandum, susu, bawang dan sebagainya meningkat. Air diliberalisasikan pengelolaannya dengan mengeluarkan UU Sumber Daya Air pada tahun 2004, anggaran untuk merawat irigasi tak di sediakan. Karena itulah hampir separuh irigasi di Indonesia tidak terawat dan tak berfungsi sampai hari ini. BULOG rencananya mau dibubarkan, namun karena ada perlawanan dari berbagai kalangan, akhirnya BULOG diperkecil perannya. LOI ini merupakan kesalahan fatal yang di lakukan Soeharto ketika pemerintahannya mau berakhir.

Dalam perjalannya, perusahaan-perusahaan transnasional (*Trans National Corporation*-TNC) dengan lihainya mengatasnamakan untuk mengatasi kelaparan di dunia dan menghapuskan kemiskinan berhasil membuat sebanyak-banyaknya perjanjian untuk membuat tiada batas lagi bagi perusahaan-perusahaan raksasa itu untuk mengurusi pertanian dan pangan. Pada tahun 1996, *World Food Summit* (WFS) dilaksanakan di Roma, Italia oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO). Lobi-lobi korporasi pangan dunia berhasil mempengaruhi isi kesekapakan summit tersebut, yang merekomendasikan bahwa liberalisasi dan privatisasi harus dilakukan dalam upaya menghapuskan kelaparan di dunia. Para pemimpin dunia ketika itu, menyatakan bahwa mereka akan menghapuskan 50 % orang-orang lapar di dunia pada tahun 2015 ini. Ketika itu jumlah orang lapar di dunia berjumlah 825 juta jiwa. Seharusnya dewasa ini orang lapar di dunia tinggal 400 juta jiwa. Akan tetapi hasil liberalisasi itu, pada tahun 2008 menunjukkan hasil sebaliknya. Krisis pangan dunia terjadi, mengakibatkan peningkatan jumlah kelaparan ummat manusia di dunia menjadi 1 milyar pada tahun 2008. Sebaliknya korporasi-korporasi bergerak di bidang pangan dan pangan justru semakin berlipat keuntungannya ketika krisis pangan tersebut.

Pada tahun 2015 ini, berdasarkan data FAO tentang *The State of Food Insecurity in the World* (Gambar. 1) menyatakan bahwa penduduk dunia yang kelaparan dalam rentang tahun 2014 – 2016 yakni sebanyak 795 miliar jiwa. Di tengah situasi demikian, perusahaan TNC malah mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit[1].

[1] FAO, The State of Food Insecurity in the World 2015

Gambar I. The State of Food Insecurity in the World 2015

	Number (millions)		Regional share (%)	
	1990–92	2014–16	1990–92	2014–16
A Developed regions	20	15	2.0	1.8
B Southern Asia	291	281	28.8	35.4
C Sub-Saharan Africa	176	220	17.4	27.7
D Eastern Asia	295	145	29.2	18.3
E South-Eastern Asia	138	61	13.6	7.6
F Latin America and the Caribbean	66	34	6.5	4.3
G Western Asia	8	19	0.8	2.4
H Northern Africa	6	4	0.6	0.5
I Caucasus and Central Asia	10	6	0.9	0.7
J Oceania	1	1	0.1	0.2
Total	1 011	795	100	100

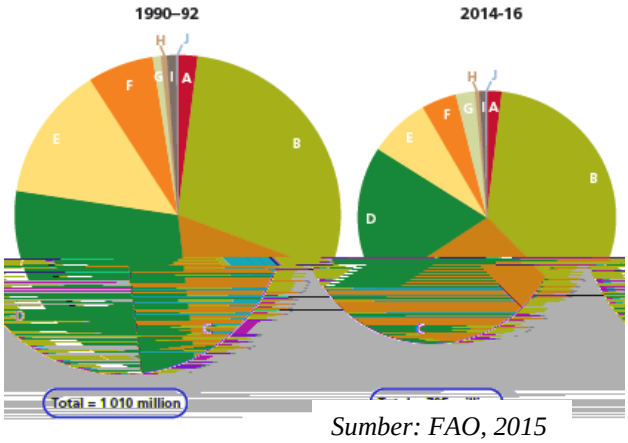

Sumber: FAO, 2015

Gambar 1I. Pertumbuhan Keuntungan Korporasi Pertanian

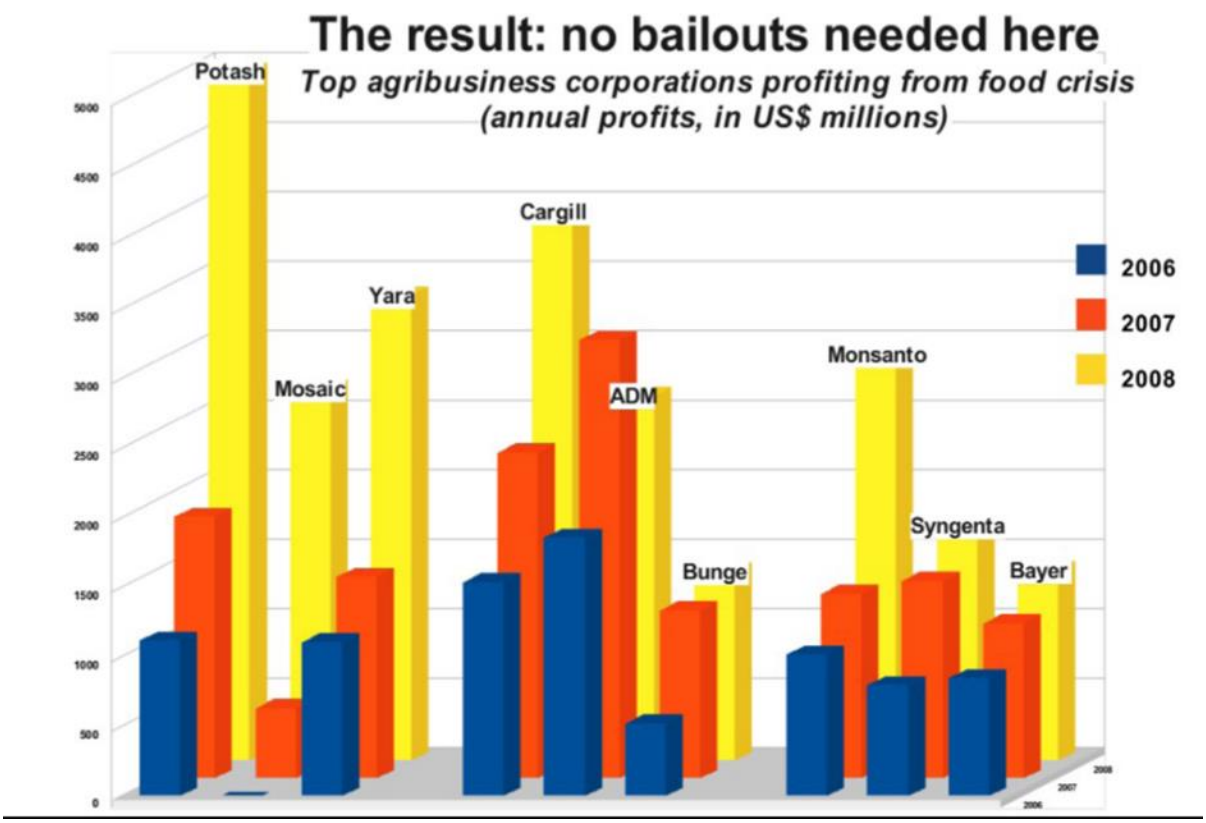

Tabel 1.

Rank	Company	Crop Protection Sales, 2011 US$ millions	% Market Share
1	Syngenta (Switzerland)	10,162	23.1
2	Bayer Cropscience (Germany)	7,522	17.1
3	BASF (Germany)	5,393	12.3
4	Dow Agro Sciences (USA)	4,241	9.6
5	Monsanto (USA)	3,240	7.4
6	DuPont Pioneer (USA)	2,900	6.6
7	Makhteshim-Agan Industries (Israel) acquired by China NACC	2,691	6.1
8	Nufarm (Australia)	2,185	5.0
9	Sumitomo Chemical (Japan)	1,738	3.9
10	Arysta LifeScience (Japan)	1,504	3.4
	Total top 10	**41,576**	**94.5**

Sumber: dari berbagai sumber, diolah SPI

Tabel 2.

Rank	Company	2011 Sales US$ millions	% Market Share
1	Yara (Norway)	10,277	6.4
2	Agrium Inc. (Canada)	10.113	6.3
3	The Mosaic Company (USA)	9,938	6.2
4	PotashCorp (Canada)	8,715	5.4
5	CF Industries (USA)	6,098	3.8
6	Sinofert Holdings Ltd. (China)	5,760	3.6
7	K+S Group (Germany)	4,349	2.7
8	Israel Chemicals Ltd. (Israel)	3,836	2.4
9	Uralkali (Russia) (includes Silvinit sales May-Dec. 2011)	3,496	2.2
10	Bunge Ltd. (USA) *acquired by Yara in late 2013	3,147	2.0
	Total top 10	**65,710**	**41%**

Sumber: dari berbagai sumber, diolah SPI

Tabel. 3

Rank	Company	Seed Sales, 2011 US$ millions	% Market Share
1	Monsanto	8,953	26.0
2	DuPont Pioneer (USA)	6,261	18.2
3	Syngenta (Switzerland)	3,185	9.2
4	Vilmorin (France) (Groupe Limagrain)	1,670	4.8
5	WinField (USA) (Land O Lakes)	1,346 (est.)	3.9
6	KWS (Germany)	1,226	3.6
7	Bayer Cropscience (Germany)	1,140	3.3
8	Dow AgroSciences (USA)	1,074	3.1
9	Sakata (Japan)	548	1.6
10	Takii & Company (Japan)	548	1.6
	Total Top 10	**25,951**	**75.3**

Sumber: dari berbagai sumber, diolah SPI

Di tingkat nasional juga bisa kita lihat dengan semakin berkurangnya jumlah keluarga petani dan sebaliknya semakin bertambahnya korporasi di bidang pertanian.

Gambar III. Penurunan Jumlah Rumah Tangga Petani dan Peningkatan Jumlah Perusahaan Pertanian

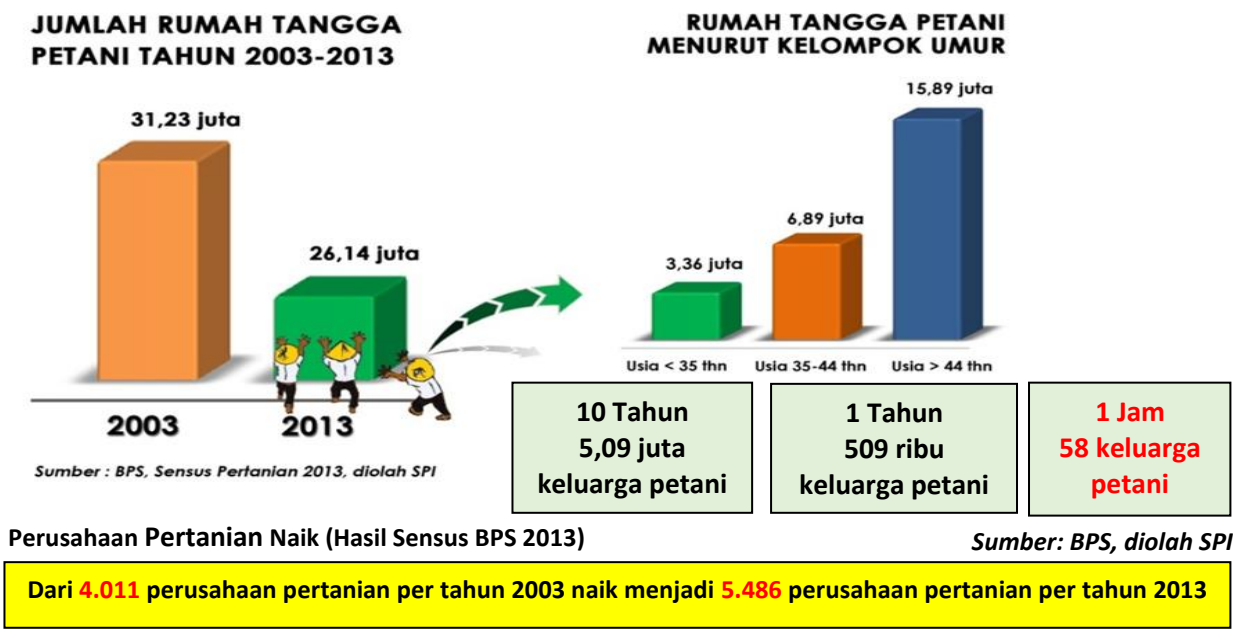

Perusahaan Pertanian Naik (Hasil Sensus BPS 2013) ***Sumber: BPS, diolah SPI***

Dari 4.011 perusahaan pertanian per tahun 2003 naik menjadi 5.486 perusahaan pertanian per tahun 2013

B. KEBANGKITAN PETANI DALAM MEMPERJUANGKAN KEDAULATAN PANGAN DI DUNIA

Petani tergusur, tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia. Karena yang terjadi adalah pertempuran antara petani kecil, keluarga petani, buruh tani dengan korporasi pertanian di seluruh dunia. Ilustrasi ringkas dibawah ini menggambarkan itu.

1. Meksiko merupakan negara yang makanan pokoknya adalah jagung, dan negara itu disebut sebagai asal usul jagung. Namun karena liberalisasi dan privatisasi yang terjadi mengakibatkan negara Meksiko harus mengimpor jagung dari USA. Demikian juga Philipina, negara ini menjadi negara pengimpor beras, meskipun pusat penelitian padi berpusat di Philipina.

2. India sanggup memproduksi minyak goreng yang berasal dari kelapa yang sangat bagus produksinya di negara itu, namun petani kelapa di India tak sanggung bersaing dengan impor minyak goreng yang berasal dari CPO dari Indonesia dan Malaysia.

3. Indonesia tak sanggup bersaing dengan gula yang diimpor dari India, kedelai dari USA dan latin Amerika. Susu, serta sapi dari Australia dan New Zeland. Gandum/terigu telah di impor sebanyak lebih dari 7 juta ton setiap tahunnya, menggusur makanan karbohidrat yang begitu banyak di alam Indonesia. Pisang, talas, sukun, singkong, ubi jalar, sagu dan sebagainya.

4. Jepang, Korea, harus mengorbankan dunia pertaniannya karena harus mengutamakan ekspor elektronik dan otomotif serta produksi industri lainnya. Sekarang 70 persen kebutuhan pangan di Jepang dan korea harus di impor dari luar negera tersebut. Hal itu lah yang membuat jumlah petani di jepang dan korea menurun drastis, dan membuat frustrasi banyak petani di negara-negara itu.

   Bahkan seorang petani teladan dari Korea Selatan bernama Lee Kuan Hae, mengakhiri hidupnya, sebilah pisau lipat dihujamkannya ke perutnya di tengah kerumunan petani yang sedang memprotes *Ministerial Meeting* WTO di Cancun Meksiko pada tahun 2003. Sambil memekikkan *WTO KILLS FARMERS.*

5. Eropa juga demikian, kebijakan pertanian yang selama ini sudah permanen melindungi petaninya harus dirubah seluruhnya. Sekarang kita saksikan sendiri betapa banyak protes-protes yang dilakukan oleh petani Eropa. Misal, 1 liter harga susu produksi petani lebih murah harganya dari harga 1 liter air mineral.

Liberalisasi dan privatisasi di bawah WTO telah membuat ketergantungan pangan di dunia. Negara-negara yang sebelumnya mempunyai kebijakan-kebijakan melindungi pertaniannya, akhirnya harus di liberalkan seluruhnya. Akibatnya yang terjadi adalah:

1. Hilangnya kedaulatan negara, dan rakyat terhadap pangannya. Karena negara tak kuasa membuat *public policy* bagi rakyatnya. Segala sesuatunya harus di atur dibawah kesepakatan WTO dan Free Trade Agrement (FTA) lainnya;

2. Kebijakan-kebijakan pangan di seluruh negara di dikte oleh korporasi-korporasi pangan, karena seluruh mata rantai produksi pangan di kuasai oleh koorporasi, mulai dari benih sampai ke tingkat pemasaran;
3. Urbanisasi secara besar-besaran terjadi di seluruh dunia. Rakyat pedesaan meninggalkan kota. Desa hanya di huni oleh orang-orang yang sudah tua;

4. *Rainforest* berkurang secara drastis di seluruh dunia. Hutan-hutan di Amazone ditebangi untuk tanaman kedelai, jagung, dan tebu. Hutan-hutan di Sumatra, Kalimantan, papua untuk tanaman kelapa sawit. Sebagai contoh yang sangat parah hari ini kita saksikan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit menyebabkan hutan gambut dibuka dan dibakar yang sebabkan kabut asap di kawasan ini;

5. Hilangnya keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Petani Eropa dan Amerika dewasa ini tak bisa lagi bertani, kecuali membeli benih dari perusahaan benih internasional. Demikian juga kita di Indonesia yang mega *diversity*, lambat laun semakin terbatas;

6. Pemanasan global terjadi di dunia. Terjadi anomali cuaca, seperti *El'nino* yang begitu lama di hadapi Indonesia;

7. Akibat ketergantungan pangan di dunia, maka untuk memproduksi dan memindahkan makanan tersebut, memerlukan energi dan pengawetan. Bisa dibayangkan betapa banyak energi yang dihabiskan untuk mendatangkan kacang kedelai dari Amerika Serikat ke Surabaya Jawa Timur jika dibandingkan dengan kacang kedelai itu didatangkan dari Kediri Jawa Timur. Demikian juga apel yang diimpor dari Amerika Serikat adalah hasil panen di bulan September, maka diperlukan pengawetan secara kimiawi untuk bisa bertahan untuk dipasarkan di bulan januari dan bulan-bulan selanjutnya pada tahun berikutnya untuk sampai di pasar Surabaya. Tentu Apel yang diproduksi di Malang Jawa Timur tak memerlukan pengawetan.

Beranjak dari kenyataan itulah, maka petani-petani yang tergabung di bawah La Via Campesina – Gerakan Petani Dunia, pada bulan April 1996, di Meksiko, pada Konferensi ke II merumuskan suatu konsep yang disebut dengan kedaulatan pangan. Konsep kedaulatan pangan ini mendapat momentumnya, karena pada akhir tahun itu FAO menyelenggarakan WFS seperti yang diterangkan diatas. La Via Campesina menggunakan momentum ini menyatakan ketidakpercayaan atas konsep ketahanan pangan (*food security*) yang dihasilkan oleh *summit* tersebut.

Bagi La Via Campesina, konsep ini adalah konsep perjuangan melawan liberalisasi pangan di tingkat dunia. Karena itu, La Via Campesian mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai perlindungan suatu negara, rakyat dan komunitas. Perlindungan lokal dari globalisasi. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Artinya, kedaulatan pangan sangat menjunjung tinggi prinsip diversifikasi pangan sesuai dengan budaya lokal yang ada.

Kedaulatan pangan juga merupakan pemenuhan hak manusia untuk menentukan sistem pertanian dan pangannya sendiri yang lebih menekankan pada pertanian berbasiskan keluarga—yang berdasarkan pada prinsip solidaritas. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Terdapat tujuh prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, antara lain adalah:

1. Pembaruan Agraria;
2. Adanya Hak Akses Rakyat Terhadap Pangan;
3. Penggunaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan;
4. Pangan untuk Pangan dan Tidak Sekadar Komoditas yang Diperdagangkan;
5. Pembatasan Penguasaan Pangan oleh Korporasi;
6. Melarang Penggunaan Pangan Sebagai Senjata;
7. Pemberian Akses ke Petani Kecil untuk Perumusan Kebijakan Pertanian.

Selain ketujuh syarat tersebut, praktek untuk membangun kedaulatan pangan harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagaimana pada diagram berikut:

TABEL. 4 PRINSIP DASAR KEDAULATAN PANGAN

1.	Tanah dan Air	Land Reform redistribusi tanah dan air untuk petani, dan masyarakat adat, dan badan-badan negara
2.	Benih	Benih Lokal
3.	Model Produksi	Agroekologi, model pertanian yang ramah lingkungan, tidak monocultur
4.	Skala Produksi	Kecil dan Menengah
5.	Target Distribusi	Pasar Lokal – Nasional

6.	Level Transportasi Pangan	Jarak Dekat dan Menengah
7.	Orientasi Pasar	Kebutuhan sendiri – Domestik
8.	Perdagangan Internasional	Mempertimbangkan Nasib Petani yang memiliki Produk yang sama di Negara Tujuan (Ekspor). Proteksi untuk Petani Domestik
9.	Energi – Bahan Bakar	Terkendali untuk BBM dengan terus menyiapkan dan menggunakan alternatif Sumber Energi dari tanaman non-pangan. Minimalkan Emisi Karbon/Polusi Udara
10.	Pelaku/Subyek Usaha	Rakyat – Koperasi dan UKM dan Industri Kecil. BUMN, Swasta sebagai kekuatan pendukung.

Sumber: LVC - SPI

TABEL. 5 TRANSFORMASI KETAHANAN PANGAN - KEDAULATAN PANGAN

NO	INDIKATOR	KETAHANAN PANGAN	KEDAULATAN PANGAN
1	Tanah dan sumberdaya air	- Dikuasai oleh Korporasi dan Petani menengah/besar memperkerjakan buruh tani - Hak Guna Usaha (HGU) kepada korporasi - Pasar Tanah	- Dikuasai dan digarap oleh Penggarap/Petani - Hak Guna Usaha (HGU) kepada Petani dan buruh perkebunan dan dikelola secara koperasi - Reforma Agraria
2	Benih	Benih hasil teknologi tinggi (GMO, Hibrida, sintesis biologi)	Benih lokal dan benih hasil pemuliaan oleh petani
3	Sistem perbenihan	- Berpihak kepada korporasi - Ada hak kepemilikan intelektual - Bank benih yang hanya bisa diakses oleh perusahaan	- Menjadi jaminan petani penangkar untuk memproduksi, memuliakan dan mendistribusikan benih dgn sistem yang diciptakan sendiri di kalangan petani - Lumbung benih komunal
4	Orientasi produksi	- Orientasi pasar - Terkhusus produk perkebunan orientasi untuk pasar ekspor utk - Profit tinggi dan akumulasi modal - Layak secara ekonomi	- Orientasi kebutuhan sendiri - Profitable (sekedarnya) - Perlu subsidi dari pemerintah bila kelayakan belum tercapai
5	Model produksi	- Revolusi hijau, evergreen revolution dan Save and Grow - pertanian monokultur - Orientasi produksi - Industrialis	- Pertanian organik, permakultur agro ecology - Orientasi kepada keseimbangan alam kelestarian lingkungan - Tumpang sari – diversifikasi - Berbasis keluarga

5	Penyediaan Pangan	- Hasil produksi sendiri - Food Estate - Impor dibawah rezim pasar bebas - Tidak ada hambatan ekspor dan impor - cadangan di sekelompok orang sehingga dimungkinkan ada penimbunan untuk spekulasi harga pangan - Spekulasi pangan melalui bursa komoditi	- Hasil produksi sendiri/ pertanian rakyat - Domestik - Tidak ada 'paksaan' untuk ekspor/ import - Proteksi terhadap serbuan produk impor (terkhusus yang merugikan petani) - Ada bulog
6	Model distribusi, jenis pemasaran dan penentuan harga	- Pemasaran ritel - Transportasi pangan dari jarak dekat hingga jarak jauh (lintas benua) - Mengutamakan pasar ekspor - Harga pasar /diserahkan ke mekanisme pasar, - Pasar bebas - Ekspor pangan dengan harga murah di negara tujuan (dumping)	- Pasar local - Kios-kios pangan rakyat - Transportasi pangan jarak dekat - Ada Harga pembelian pokok dari Pemerintah - Tidak mengambil profit utk akumulasi modal (profitable) - Proteksi pasar dari Pemerintah
7	Pelaku utama	- Korporasi, petani besar dan buruh tani - Pemerintah (minimalis)	- Petani penggarap - Organisasi tani dan koperasi - Pemerintah sebagai pelindung
8	Bahan Bakar – dlm konteks pemanasan global dan perubahan iklim	- Bahan bakar fossil - Bahan bakar pengganti diambil dari pangan (agro fuel)	- Bahan bakar fossil - Bio fuel non pangan
9	Kredit Pertanian (prioritas)	- Korporasi dan Petani Besar - Syarat mempunyai agunan	- Petani kecil dan petani gurem
10	Subsidi Pertanian	Tidak ada subsidi agar tidak ada mendistorsi pasar	Insentif dan Tetap diberikan Perlindungan oleh Pemerintah

Sumber: LVC - SPI

Dalam perkembangannya, perjuangan mewujudkan kedaulatan pangan ini semakin *massive*. La Via Campesina bersama dengan gerakan rakyat dunia menentang Ministerial Meeting WTO yang di laksanakan di Seatle USA pada tahun 1999. Pada aksi itu LVC mendesakkan agar WTO keluar dari urusan pertanian, dan menawarkan kedaulatan pangan sebagai alternative dalam urusan pangan. Sejak aksi di Seatle LVC melakukan aksi-aksi perlawanan dimanapun WTO berunding, seperti di Cancun Mexico 2003, Hongkong 2005, Geneva 2007, dan terakhir di Bali 2013.

Kemudian momentum penting dalam perjuangan kedaulatan pangan ini terjadi pada Juni 2002, pada pertemuan World Food Summit Five Years Later di Roma. Dalam pertemuan ini sejumlah organisasi sosial yang mewakili petani kecil, buruh tani, nelayan, masyarakat adat bersama sejumlah NGO membentuk International Planning Committee for Food Sovereignty (IPC). IPC berperan untuk memfasilitasi dialog antara masyarakat sipil dan FAO dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

Konsep kedaulatan pangan pun semakin dikembangkan dan mendapat dukungan yang meluas. Pada tahun 2007 diadakanlah Konferensi Internasional Kedaulatan Pangan di Nyeleni, Mali. Konferensi ini semakin menguatkan pemahaman dan perjuangan gerakan sosial mewujudkan kedaulatan pangan menjadi alternatif menjawab permasalahan pangan dan pertanian global. Selanjutnya pasca krisis pangan yang melanda seluruh dunia di awal tahun 2008, terjadi reformasi besar di dalam tubuh Komite Ketahanan Pangan PBB (CFS) akibat tekanan dan kritik masyarakat sipil.

Pada sidang ke-35 Komite Ketahanan Pangan bulan Oktober 2009, secara resmi CFS membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat sipil untuk terlibat dan memainkan peranan penting dalam menyusun kebijakan untuk menghapuskan kelaparan di dunia. CFS bertugas mengatasi kelaparan dunia dengan gerakan petani sebagai salah satu anggota pada *advisory committee*-nya. Ini menjadi jalan yang membuka dialog antara petani kecil dan petani korban dengan institusi-institusi seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*), WFP (*World Food Program*), dan IFAD (*International Fund for Agricultural Development*).

Hal ini dimanfaatkan gerakan petani dan masyarakat sipil lainnya untuk memasukkan sebuah alternatif sistem pangan yang demokratis—seperti yang didiskusikan dalam Komisi FAO untuk Ketahanan Pangan Dunia—yang harus dilaksanakan agar negara-negara dan masyarakat di seluruh dunia memiliki hak untuk melaksanakan Kedaulatan Pangan. Solusi sejati mengatasi krisis pangan berarti bahwa petani kecil, dan bukan perusahaan transnasional, harus mendapatkan kontrol atas sumberdaya agraria yang dibutuhkan untuk memproduksi pangan yaitu, tanah, air, benih dan pasar lokal. Akhirnya konsep kedaulatan pangan menjadi alternatif bagi kebijakan ekonomi di banyak negara.

C. KEBANGKITAN PERJUANGAN KEDAULATAN PANGAN DI INDONESIA

Di tingkat nasional perjuangan kedaulatan pangan pun mulai semakin masif. Pendidikan di tingkat organisasi tani menjadi hal yang signifikan untuk memperkuat perjuangan kedaulatan pangan ini. Hal ini penting untuk memperkuat tekanan rakyat dalam perubahan kebijakan pangan dan pertanian di tingkat nasional hingga daerah. Dalam realisasinya, kedaulatan pangan akan tercapai apabila petani sebagai penghasil pangan memiliki, menguasai dan mengkontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi serta berbagai kebijakan yang mendukungnya dalam bingkai pelaksanaan pembaruan agraria.

Hal ini perlu disertai dengan melaksanakan pertanian rakyat yang berkelanjutan bukan saja untuk memperbaiki kualitas tanah, lingkungan dan produksi yang aman bagi kesehatan manusia. Program tersebut hendaknya dijalankan dengan sungguh-sungguh sebagai upaya untuk melepas ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan transnasional penghasil input pertanian. Gerakan kedaulatan pangan mulai meluas di Indonesia terutama sejak tahun 2002.

Karena meskipun krisis pangan belum terjadi, namun tanda-tanda kegagalan konsep ketahanan pangan yang dijalankan FAO sudah mulai terlihat. Karena itu berbagai inisiatif sudah dilakukan gerakan rakyat di Indonesia seperti membangun koalisi penegakan kedaulatan pangan. Pergerakan ini mendapat respons positif dari kalangan partai, dengan adanya aksi di ruang parlemen untuk penolakan atas impor beras di Indonesia. Kemudian berbagai seminar juga dilakukan oleh kalangan partai untuk memahami sebab-sebab terjadinya ketergantungan pangan.

Di tingkat parlemen, ketergantungan pangan dan tak sanggupnya Indonesia menghasilkan produksi pangan dalam negeri dijawab oleh DPR dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah konversi lahan pertanian ke non pangan. Krisis pangan tahun 2008 menyadarkan banyak kalangan bahwa untuk memperkecil ketergantungan pangan di Indonesia, harus lebih luas lagi upaya yang harus dilakukan. Tidak cukup hanya sekedar mencegah konversi lahan, tapi harus lebih luas lagi, mengatur soal perdagangan pangan. Atas desakan dari gerakan rakyat, diantaranya pada 24 Februari 2011, Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama sejumlah organisasi tani lainnya, organisasi sosial lain, LSM, hingga para akademisi menggagas suatu Petisi Kedaulatan Pangan Rakyat Indonesia.

Petisi Kedaulatan Pangan ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas desakan kepada pemerintah untuk mengubah sistem pangan dan pertanian yang ada saat ini demi melindungi dan memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Kebangkitan perjuangan kedaulatan pangan ini juga mulai terlihat dengan adanya respons di tingkat legislasi dengan perubahan UU Pangan No. 7/1996 guna menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan kepada setiap warga negara. Sejumlah organisasi terkait yang berkompeten – diantaranya SPI, *Indonesia Human Right Commission for Social Justice* (IHCS), Solidaritas Perempuan (SP), Bina Desa dan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) – juga telah menyampaikan naskah akademik untuk perubahan Undang-Undang tersebut.

Langkah ini melahirkan UU Pangan No. 18 tahun 2012 yang berisi tentang prinsip-prinsip kedaulatan pangan. Kemudian untuk memperkuat posisi hak asasi petani, petani sebagai kekuatan utama untuk memproduksi pangan, SPI dan gerakan sipil lainnya melalui proses panjang sejak tahun 2000, akhirnya berhasil mendorong parlemen untuk mengeluarkan UU N0. 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tidak berhenti gerakan rakyat di Indonesia juga melakukan upaya pengaturan kembali atau mencabut undang-undang sektoral yang saling bertabrakan dan tidak menguntungkan rakyat dan negara Indonesia, seperti UU Perkebunan No.18/2004, UU Pengelolaan Sumber Daya Air No.7/2004, UU Kehutanan No. 19/2004, dan UU Penanaman Modal No. 25/2007.

D. KEDAULATAN PANGAN DI BAWAH PEMERINTAHAN JOKOWI - JK

Kedaulatan pangan saat ini telah memasuki era baru, setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla—Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014-2019—memasukkan kedaulatan pangan ke dalam satu di antara sembilan cita-cita politik (*nawa cita*) yang harus dilaksanakannya. Karena itulah rakyat tani yang merupakan pihak pengusul dan menjadi kelompok terbesar pendukung pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam kampanye pemilihan Presiden-Wakil Presiden, harus turut memastikan bahwa janji pelaksanaan kedaulatan pangan tersebut benar-benar bisa diwujudkan.

Kini setelah 1 tahun pemerintahan Joko Widodo, pemeritahan sekarang harus memperhatikan dengan seksama dengan peristiwa yang terjadi sekarang ini:

1. Terjadi peningkatan harga beras yang tinggi dari harga dasar yang ditentukan pemerintah, kejadian ini tidak pernah terjadi sebelumnya;
2. Nilai mata uang Asing US$ melambung tinggi, namun harga komoditas sawit dan karet justru menurun. Pada masa sebelumnya naiknya harga US$ diikuti dengan naiknya harga-harga komoditas ekspor;
3. Kejahatan terhadap pangan meningkat, mulai dari beras bercampur plastik, makanan yang dicampur dengan bahan kimia, makanan kadaluarsa yang diperjual belikan dan sebagainya.
4. Kampanye pangan yang tidak sehat begitu gencar di berbagai media yang ada.
5. Musim kemarau yang panjang yang menimpa sentra-sentra produsen beras di Indonesia, terutama Jawa;
6. Kebakaran yang meluas untuk pembukaan lahan perkebunan sawit dan tanaman industry, yang menimbulkan asap menyelimuti berabagai wilayah dan lintas negara
7. Over suplay benih ayam industri yang mendorong rencana pemusnahannya.
8. OECD telah mengingatkan pemerintahan sekarang untuk menjalankan kedaulatan pangan
9. WTO akan melaksanakan ministerial meeting di Bulan Desember 2015 di Nairobi, Kenya, maka pemerintah Indonesia harus memperjuangkan kedaulatan pangan dalam perundingan tersebut.

Selain itu, program-program yang dijalankan pemerintah dewasa ini dalam mencapai kedaulatan pangan haruslah memperhatikan hal yang disampaikan berikut ini:

1. Mengintrodusir alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) dalam skala luas, seperti traktor, mesin pompa, dan sebagainya yang berasal dari impor. Hal ini mengabaikan tekad untuk menghidupkan industri nasional. Jepang dan Korea Selatan ketika membangun pertaniannya menggunakan traktor dan mesin pertanian yang sangat sederhana yang berasal dari Industri nasionalnya. Jangan melihat Yanmar, Kubota, dan Yamaha seperti sekarang ini, harap dilihat 40 tahun lalu. Pemerinah harus mendorong penggunaan ALSINTAN produksi nasional dan ramah lingkungan.

2. Penggunaan benih yang diproduksi oleh TNC. Hal ini bertentangan dengan rencana membangun Desa Berdaulat Benih, dan juga kapasitas dari lembaga-lembaga riset nasional dan Universitas yang sudah memproduksi benih unggul selama ini. Upaya menyebarluaskan benih rekayasa genetika harus segera dihentikan.

3. Janji distribusi tanah 9 Juta hektar kepada rakyat tak bertanah harus disegerakan. Berbahaya peningkatan produksi pertanian tanpa terlebih dahulu melakukan *land reform*. Hentikan wacana pendistribusian tanah 9 juta hektar itu kepada korporasi pangan. Karena korporasi pangan sudah menguasai lahan sangat luas sekali. Janji Reforma agrarian haruslah segera dilaksanakan, jangan di tunda-tunda lagi.

4. Harus mengubah orientasi produksi pertanian Indonesia untuk kepentingan nasional bukan untuk kepentingan ekspor. Karena itu, perkebunan kelapa sawit yang sudah terlampau luas dan kelebihan produksi harus dikurangi. Tanah perkebunan kelapa sawit harus di konversi menjadi tanaman pangan, dan hutan serta padang gembala. Harus dicatat luas perkebunan kelapa sawit Indonesia dua kali lipat dari Malaysia, namun produksinya hampir sama. Untuk pulau Jawa sudah tidak boleh lagi ada perkebunan kelapa sawit dan karet;

5. Penggunaan pupuk organik harus diperluas. Keberlangsungan pabrik pupuk kimia harus dikurangi. Subsidi yang begitu besar untuk pupuk harus secara perlahan dihentikan, dan digantikan dengan subsidi ke pupuk organik.

6. Harus dilakukan upaya yang luas untuk mengubah sistem pertanian yang ada sekarang menjadi pertanian yang agroekologis, yang ramah lingkungan.

7. Luas hutan di Jawa harus ditambah, berasal dari eks tanah perkebunan, dan PERHUTANI. Keberadaan PERHUTANI harus ditinjau, sebaiknya tanah yang dikuasai Perhutani didistribusikan untuk tanaman pangan dan hutan abadi.

8. Kelembagaan petani yang ada sekarang harus ditinjau sesuai UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tahun 2013 dan hasil sidang MK. Karena kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok Tani (gapoktan) yang ada sekarang ini sudah tak memadai. Banyak bantuan pemerintah yang salah sasaran dan tak sampai ke sasaran.

9. Memfungsikan koperasi dan usaha-usaha bersama petani yang bekerjasama dengan Bulog dalam pengadaan stok pangan. Tidak seperti yang sekarang ini terjadi, Bulog umumnya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta beras. Sehingga Bulog yang tergantung ke perusahaan-perusahaan itu. Pembentukan kelembagaan pangan sesuai perintah UU Pangan No. 18 tahun 2012 jangan di tunda lagi.

10. Kampanye untuk mengkonsumsi pangan lokal dan beragam haruslah lebih dimasifkan, tidak boleh membiarkan rakyat terus mengkonsumsi gandum dalam jumlah besar, dan hanya mengkonsumsi beras sebagai sumber karbohidrat. Indonesia bisa memproduksi pisang, singkong, talas, dan sagu, serta berbagai sumber karbohidrat lainnya.

11. Impor pangan harus dihentikan secara total, tidak boleh ditawar-tawar, walau dalam kondisi yang bagaimana pun. Karena sumber pangan di Indonesia sebenarnya sangat banyak sekali, dan rakyat bisa memproduksinya.